



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 626 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS ± 6.681 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG ENAM RIBU ENAM RATUS DELAPAN  
PULUH SATU METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3911/-076.343 tanggal 7 November 2018 Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 6.681 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) terdiri dari tanah seluas ± 1.548 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Prof. Dr. Satrio Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah seluas ± 45 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Bangka VIII (d/h Jalan Kemang J.C 3) Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan tanah seluas ± 5.088 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima ribu delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Setiabudi Raya/Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 6.681 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

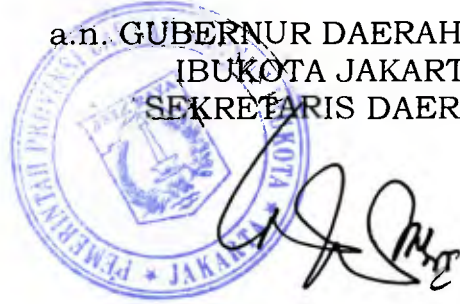
**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS  $\pm 6.681 \text{ m}^2$  (LEBIH KURANG ENAM RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 6.681 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) terdiri dari tanah seluas  $\pm 1.548 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Prof. Dr. Satrio Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah seluas  $\pm 45 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Bangka VIII (d/h Jalan Kemang J.C 3) Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan tanah seluas  $\pm 5.088 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ribu delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Setiabudi Raya/Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR **626** TAHUN **2020**

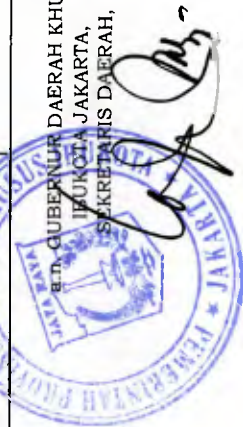
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH SELUAS ± 6.681 M2 (LEBIH KURANG ENAM  
RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU METER PERSEGI)  
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**A. TANAH**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000703	m2	1548	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Prof. Dr. Satrio Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	71.252.892.000,00	-
2	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000704	m2	45	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Bangka VIII (d/h Jalan Kemang J C 3) Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	442.935.000,00	-
3	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000702	m2	5088	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Setuabudi Raya / Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	224.701.344.000,00	-

B.H. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 626 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 6.681 M<sup>2</sup> (LEBIH  
KURANG ENAM RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH  
SATU METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	No. Dokumen	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000703	m <sup>2</sup>	1.548	-	Fasos Fasum	2017	Jalan Prof. Dr. Satrio, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	71.252.892.000,00	-
2.	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000704	m <sup>2</sup>	45	-	Fasos Fasum	2017	Jalan Bangka VIII (d/h Jalan Kemang J.C.3) Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	442.935.000,00	-
3.	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	000702	m <sup>2</sup>	5.088	-	Fasos Fasum	2017	Jalan Setiabudi Raya/Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	224.701.344.000,00	-

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH